

Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya terhadap Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Kota Cirebon, 1994-2011

Juhaeriyah, Singgih Tri Sulistiyono, Alamsyah
Program Studi Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Diponegoro

Alamat korespondensi: juhaeriyah16@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the development of the Fishing Port and its contribution to the economic life of fishing communities at Cirebon in 1994-2011. The Fisheries Port of the Surgeon was built in 1994 and began operating in 1997 with trial status. Then in 1999, the Cirebon fishing port status changed to the Nusantara Fisheries Port (PPN). PPN equipped with basic, functional, and supporting facilities that aim to support port activities. The basic facilities available in PPN Vocational consist of trapezoidal breakwaters. Meanwhile, the technical facilities available at PPN included administrative offices, Fish Auction Places (TPI), ice warehouses, water reservoirs, water networks equipped with water pumps, meters, and pipe installations that reach the port dock, as well as electricity networks. Besides, PPN also had supporting facilities consisting of security posts, mosques, bathrooms, and official homes. In its development, PPN Kejawanan had a significant contribution in the socio-economic empowerment efforts of fishing community at Cirebon. Those efforts were included in empowering women at households level and fostering the fishermen to increase welfare and employment opportunities.

Diterima / Received:
20 Desember 2018

Disetujui / Accepted:
30 Desember 2018

Keywords: Fishing Port; Coastal Society; Economic Income; Cirebon.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Pelabuhan Perikanan Kejawanan dan kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan Kota Cirebon tahun 1994-2011. Pelabuhan Perikanan Kejawanan dibangun pada 1994 dan mulai beroperasi pada 1997 dengan status uji coba. Kemudian pada 1999, status pelabuhan perikanan Cirebon berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan. PPN Kejawanan dilengkapi oleh fasilitas pokok, fungsional, dan pendukung yang bertujuan untuk menunjang aktivitas kepelabuhanan. Fasilitas pokok yang ada di PPN Kejawanan sendiri terdiri atas pemecah gelombang berbentuk trapesium. Sementara itu, fasilitas fungsional yang ada di PPN Kejawanan mencakup kantor administrasi, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), gudang es, reservoir air, jaringan air bersih yang dilengkapi dengan pompa air, meteran, dan instalasi pipa yang jaraknya mencapai dermaga pelabuhan, serta jaringan listrik. Selain itu, PPN Kejawanan juga memiliki fasilitas penunjang yang terdiri atas pos keamanan, masjid, kamar mandi, serta rumah dinas. Dalam perkembangannya, PPN Kejawanan rupanya mempunyai kontribusi yang besar dalam usaha pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan Kota Cirebon. Pemberdayaan dari segi sosial antara lain berupa pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga nelayan dan pembinaan nelayan, sedangkan pemberdayaan dari segi ekonomi mencakup kesejahteraan hidup nelayan dan kesempatan kerja.

Kata Kunci: Pelabuhan Perikanan; Masyarakat Pesisir; Pendapatan Ekonomi; Cirebon.

Pendahuluan

Sebagai sebuah kota yang berada di pesisir Utara Jawa, Cirebon memiliki konstruksi *landscape* geografis yang tidak berbeda dari kota-kota pelabuhan lainnya di pesisir Utara Jawa, seperti: Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Cirebon memiliki konstruksi dataran rendah yang terdiri atas daerah pesisir pantai dan pedalaman yang cukup strategis untuk menunjang aktivitas sosial ekonomi dalam dunia pelayaran dan perdagangan maritim (Wahid, 2009, p. 27). Kota Cirebon terletak di wilayah pesisir dan mempunyai panjang pantai kurang lebih 7 km. Setelah pemberlakuan otonomi daerah, Pemerintah Cirebon dapat mengelola wilayah lautnya sampai dengan 4 mil, sehingga memiliki luas wilayah perairan laut kurang lebih 51,86 km² atau 58,13% dari total luas wilayah daratan dan lautan (Bappeda Kota Cirebon, 2003, p. 13).

Sebagai kota yang diberi kewenangan untuk mengelola wilayah kelautan, Cirebon tentu memiliki pesisir yang berpotensi untuk menjadi pelabuhan. Salah satu Pelabuhan Perikanan besar yang ada di Cirebon adalah PPN Kejawanan yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Secara ekologis, lokasi PPN Kejawanan merupakan daerah pantai yang menjadi perpaduan dari dua muara sungai, yaitu Sungai Kesunean dan Sungai Kalijaga. PPN Kejawanan mulai dirintis pada 1976, namun pembangunannya tersendat-sendat karena kesulitan dana. Pembangunan baru intensif dilakukan pada 1994, kemudian pada Mei 1997, Pelabuhan Perikanan Kejawanan mulai dioperasikan dengan status uji coba. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1999, status Pelabuhan Perikanan Kejawanan ditingkatkan menjadi PPN. Seiring dengan peningkatan status pelabuhan yang kemudian menjadi motivasi bagi PPN Kejawanan untuk terus meningkatkan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam kontribusi PPN Kejawanan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon pada umumnya dan nelayan di sekitar PPN Kejawanan pada khususnya. Pada prinsipnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PPN Kejawanan serta pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial masyarakat nelayan Kota Cirebon. Berdasar latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana perkembangan PPN Kejawanan pada 1994-2011? *Kedua*, bagaimana kontribusi PPN Kejawanan terhadap pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan Kota Cirebon?

Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode sejarah, yang terdiri atas empat tahapan pokok, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi fakta, dan terakhir adalah historiografi. Tahap pertama penyusunan penelitian ini adalah pengumpulan sumber, yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Untuk mendapatkan sumber primer, penulis melakukan penelusuran ke sumber-sumber terkait, yaitu: PPN Kejawanan, BPS Kota Cirebon, Bappeda Kota Cirebon, dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Dirjen PT KKP RI). Adapun sumber yang didapatkan dari PPN Kejawanan, antara lain: arsip dan laporan tahunan di PPN Kejawanan, data anggaran pembangunan dan perbaikan fisik PPN Kejawanan, data statistik mengenai perikanan dan perbekalan nelayan untuk melaut. Dari kantor BPS dan Bappeda Kota Cirebon, penulis menemukan data statistik Kota Cirebon 1995-2011. Dalam data statistik tersebut, terdapat berbagai laporan yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kota Cirebon pada umumnya dan wilayah di sekitar PPN Kejawanan. Selanjutnya, dari kantor Dirjen PT KKP RI, penulis menemukan data mengenai jumlah nelayan. Meski data yang didapatkan tidak lengkap, namun cukup jika digunakan untuk menggambarkan aktivitas nelayan di PPN Kejawanan.

Selain melakukan penelusuran ke berbagai kantor dan dinas terkait, penulis juga mewawancarai beberapa informan untuk mengetahui perkembangan PPN Kejawanan sejak dibangun pada 1994 sampai dengan 2011 secara detail. Mereka adalah nelayan, ABK, pegawai pabrik pengolahan ikan, pegawai PPN Kejawanan, dan pegawai Dirjen PT KKP RI PPN Kejawanan. Dari hasil wawancara, penulis mendapatkan informasi tambahan yang tidak ada pada data tertulis. Selain memanfaatkan sumber primer, penulis juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari artikel, surat kabar, buku-buku, dan karya ilmiah yang relevan.

Setelah semua sumber terkumpul, selanjutnya dilakukan kritik terhadap sumber tersebut, baik kritik ektern untuk memperoleh sumber yang otentik maupun kritik intern untuk memperoleh sumber yang kredibel. Tahap ketiga dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. Pada tahap ini, dituntut kecermatan dan sikap objektif, terutama dalam hal interpretasi terhadap fakta sejarah. Tahap yang terakhir adalah historiografi. Histotografi adalah proses penulisan kembali peristiwa sejarah yang dibatasi oleh ruang lingkup spasial, dalam hal ini adalah Kota Cirebon dan lingkup temporal mencakup periode 1994-2011 yang berkaitan dengan perkembangan PPN Kejawanan dan kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan Kota Cirebon.

Letak Geografis dan Perkembangan Fisik PPN Kejawanan

Kota Cirebon mempunyai panjang pantai ± 7 km dan setelah otonomi daerah diberlakukan, Pemerintah Kota Cirebon diberi kewenangan untuk mengelola wilayah lautnya sepanjang 4 mil, sehingga menjadikan Kota Cirebon memiliki luas wilayah perairan laut $\pm 51,86$ km² atau 58,13% dari total luas wilayah. Di Kota Cirebon sendiri, terdapat empat sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah, yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila (penyatuan dari Sungai Sicemplung dan Sungai Sijarak), Sungai Kesunean, dan Sungai Kalijaga (penyatuan dari Sungai Kalong, Sungai Cideng, dan Sungai Lunyu) (Bappeda Kota Cirebon, 2003, p. 11).

PPN Kejawanan terletak di Selatan Pelabuhan Cirebon, kurang lebih berjarak 2,5 km dari pelabuhan umum, atau tepatnya berada di Kampung Kejawanan dan Kampung Karangdawa Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk. PPN Kejawanan merupakan pelabuhan tipe B dengan luas area 19,16 ha. Kejawanan merupakan daerah pantai yang permukaan tanahnya datar dan sedikit landai. Sebagian besar wilayah daratannya merupakan area persawahan, sedangkan wilayah tepi pantainya dimanfaatkan sebagai tempat tambak ikan dan ditanami tanaman bakau. Sebelum dibangun menjadi sebuah pelabuhan, wilayah ini adalah rawa-rawa dengan kandungan lumpur cukup banyak (Wawancara dengan Rakim, 20 Februari 2017).

Pembangunan fisik PPN Kejawanan sendiri dilakukan secara bertahap. Pembangunan yang dimulai pada 1994 ini meliputi pembangunan fasilitas fisik, yaitu pembangunan sarana penunjang aktivitas pelabuhan dan pembangunan nonfisik yang di antaranya mencakup peningkatan pelayanan administrasi. Namun demikian, pembangunan lebih dititik beratkan pada pembangunan fisik pelabuhan karena berkaitan dengan optimalisasi aktivitas di pelabuhan, mulai dari pendaratan hasil tangkap, pemenuhan kebutuhan melaut, sampai dengan produksi perikanan. (Dirjen PT KKP RI, 2004, p. 29).

Tahun 1994 merupakan tahap awal pembangunan konstruksi PPN Kejawanan. Pembangunan tersebut meliputi pembuatan *break water* bagian timur dengan panjang 7.736 m³ dan bagian barat 24.750 m³, renovasi gedung TPI lama seluas 200 m² yang digunakan sebagai kantor administrasi pelabuhan sementara, serta pembangunan fasilitas pelabuhan lain di tanah sekitar TPI seluas 1.645 m³. Pada 1996, pembangunan fisik dilanjutkan dengan membangun dermaga utama sepanjang 1.170 m² dan pelataran dermaga seluas 2,925 m². Pembangunan dermaga ini sangat

penting, selain karena digunakan sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan dan perbekalan kapal yang akan melaut, dermaga juga digunakan sebagai tempat kapal-kapal bertambat. Pada tahun ini juga mulai dibangun gedung TPI baru seluas 940 m² yang terdiri atas dua lantai.

Pada 1996, dilakukan pengerukan kolam sedalam 318.130 m³. Kegiatan itu adalah bagian dari normalisasi kolam yang mengalami pendangkalan. Kegiatan pengerukan bertujuan untuk mempermudah kapal-kapal yang akan masuk ke kolam pelabuhan. Pekerjaan fisik lain yang dilakukan pada 1996 adalah reklamasi tanah untuk dimanfaatkan sebagai drainase bervolume 4.400 m³. Selain itu, dilakukan juga penyambungan saluran air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM) sebanyak satu unit, penyambungan instalasi listrik satu unit, dan pemasangan pompa air sebanyak dua buah. Pembangunan fasilitas pelabuhan pada 1996 menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1.468.493.760.

Pada periode berikutnya, yaitu 1997 mulai dibuat drainase seluas 2.039 m yang difungsikan sebagai tempat untuk mengurangi kelebihan air. Pada tahun ini juga dibuat tembok penahan tanah sepanjang 950 m dan menghabiskan anggaran sekitar Rp. 385.473.000. Anggaran tersebut berasal dari APBN (Dirjen PT KKP RI, 2000, p. 6). Pada 1998, pembangunan difokuskan pada pembuatan jalan masuk menuju pelabuhan dengan panjang mencapai 2.080 m². Pembangunan dilanjutkan dengan membuat drainase di sisi timur dan barat pelabuhan seluas 400 m², pengerukan sungai bagian barat sepanjang 200 m, dan pembangunan turap/tanggul untuk menahan air. Pada tahun ini juga mulai dipasang pagar area gedung TPI sepanjang 145 m dan paving blok di area pelabuhan seluas 1.076 m². Pada 1999, dilakukan pekerjaan pembuatan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP), yaitu pembuatan alur pelayaran dengan lebar 80 m dan panjang 800 m sebanyak satu unit. Selain itu, dibangun juga gudang pendingin satu unit, dan kamar mandi seluas 48 m² (Dirjen PT KKP RI, 2000, p. 6).

Pada 2002, drainase bagian barat yang semula hanya memiliki panjang 200 m, kemudian direnovasi di diperpanjang hingga mencapai 1.239 m. Rumah dinas tipe 70 seluas 70 m² yang berjumlah satu unit juga dibangun. Pada 2003, dilakukan perluasan pos penjagaan seluas 12 m², pengaspalan jalan sepanjang 3.000 m², paving blok areal parkir pelabuhan 1.000 m², dan terakhir renovasi kantor administrasi pelabuhan seluas 300 m² (Dirjen PT KKP RI, 2002, p. 15).

Proyek pembangunan fisik pada 2004 di PPN Kejawanannya antara lain mencakup pengerukan kolam pelabuhan yang mulai mengalami pendangkalan dan pembuatan alur pelabuhan seluas 60.436 m², pemasangan pagar BRC untuk kantor administrasi pelabuhan sepanjang 330 m², renovasi kantor lama untuk gedung pertemuan nelayan seluas 360 m², dan pembangunan pos pengawasan serta pembangunan gudang seluas 50 m². Pada tahun ini juga dilakukan peninggian jalan kompleks area pelabuhan sepanjang 1.176 m² sekaligus pengaspalan jalan sepanjang 720 m², pemasangan pagar keliling kantor baru sepanjang 330 m, serta pemasangan tralis besi pada gedung kantor administrasi baru sepanjang 50 m² (Dirjen PT KKP RI, 2004, p. 25).

Pada 2005 sampai 2007, di PPN Kejawanannya juga banyak dilakukan perbaikan terhadap beberapa sarana penunjang aktivitas kepelabuhanannya yang meliputi pengerukan kolam pelabuhan seluas 68.407 m², perbaikan *break water* sepanjang 4.360 m³ dan peninggian evaluasi *break water* 3.529 m³. Kemudian dilakukan juga pembangunan fasilitas jalan kompleks pelabuhan bagian timur di area industri pengolahan ikan seluas 1.254 m². Pembangunan jalan tersebut dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan hilir mudik pengangkutan ikan, es, udang, dan lain sebagainya (Dirjen PT KKP RI, 2005, p. 42).

Pada 2006, kolam pelabuhan sedalam 67.262 m³ kembali dikeruk, dan evaluasi *break water* bagian barat seluas 3.942 m³ ditinggikan. Selain itu, juga dilakukan

pengerukan lahan di sebelah dermaga sedalam 2.800 m³. Selanjutnya pada 2007, rumah dinas di area pelabuhan diperluas. Rumah yang sebelumnya hanya bertipe 70 dengan luas 70 m² kemudian direnovasi menjadi rumah dengan tipe 45 dan luas 160 m². Renovasi rumah dilakukan bersamaan dengan pengaspalan jalan pelabuhan sepanjang 1.500 m². (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 36). Pada 2008, pembangunan dilanjutkan dengan memperbaiki beberapa fasilitas fisik pelabuhan, antara lain: gedung TPI, saluran drainase bagian barat sepanjang 275 m, jalan kompleks pelabuhan bagian barat sepanjang 329 m², sarana ibadah (masjid), paving blok rumah dinas, membangun tempat pembuangan sampah seluas 50 m², kolam pelabuhan sedalam 38,523 m³, serta ruang satpam seluas 25 m². Adapun biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki seluruh fasilitas fisik pelabuhan pada 2006 adalah sekitar Rp. 1.711.955.000 (Dirjen PT KKP RI, 2008, p. 33).

Pada 2009, dibangun dermaga sepanjang 326 m². Pembangunan dermaga tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daya tampung kapal. Dengan adanya dermaga baru, diharapkan kegiatan operasional pelabuhan semakin optimal. Selain itu, keberadaan dermaga baru tersebut juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi kapal-kapal dari daerah lain untuk berkunjung dan mendaratkan hasil tangkapnya di PPN Kejawan. Masih di tahun yang sama, sebuah gedung untuk lembaga keuangan juga dibangun. Gedung tersebut dibangun di atas lahan seluas 75 m² untuk meningkatkan sektor perekonomian nelayan, khususnya yang berskala kecil, yaitu berupa penyediaan modal. Namun demikian, pada 2010, baik pembangunan maupun perbaikan fasilitas pelabuhan di PPN Kejawan tidak terlalu intensif. Adapun perbaikan fasilitas pelabuhan hanya meliputi pematangan jalan batas, renovasi selasar atau koridor, pembangunan menara air, perbaikan jaringan listrik kantor administrasi pelabuhan, dan perbaikan IPAL (Dirjen PT KKP RI 2010, p. 30).

Pada 2011, dilakukan kembali pengerukan kolam pelabuhan sedalam -3 m di PPN Kejawan. Pengerukan ini dilakukan dalam rangka normalisasi kedalaman kolam yang terus mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Selain itu, pada tahun ini juga dibangun sebuah gedung *workshop*. Gedung ini difungsikan sebagai tempat kegiatan para nelayan dalam melakukan berbagai kegiatan kenelayan, seperti: perbaikan kapal, jaring, dan lain sebagainya. Sementara itu, perbaikan dan peninggian elevasi *break water* juga terus dilakukan untuk tetap menjaga agar air laut tidak mudah masuk ke pelabuhan. *Break water* di PPN Kejawan lebih berfungsi sebagai penahan sedimentasi karena gelombang di perairan relatif kecil. Hal itu dilakukan karena *break water* di Pelabuhan Kejawan sering kali mengalami penurunan, sehingga mempercepat proses pendangkalan. Selain memperbaiki fasilitas fisik, perbaikan infrastruktur PPN Kejawan berupa pengaspalan jalan di area pelabuhan juga terus dilakukan. Di antara infrastruktur PPN Kejawan yang mendapatkan perhatian pada tahun antara lain, jalan di sisi selatan, barat, dan timur dermaga.

Fasilitas yang ada di PPN Kejawan tidak jauh berbeda dari fasilitas yang ada di pelabuhan niaga. Fasilitas tersebut terdiri atas fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas pendukung/penunjang. Fasilitas pokok sendiri merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pelabuhan perikanan. Fasilitas pokok berfungsi sebagai sarana yang di antaranya diperlukan untuk kepentingan keselamatan pelayaran, tempat kapal berlabuh dan bertambat, serta tempat bongkar muat barang.

Adapun fasilitas pokok yang ada di PPN Kejawan sejak 1994 sampai dengan 2011 antara lain: tanah area pelabuhan, *break water*, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dermaga, tembok penahan tanah, jalan, dan drainase. Fasilitas pokok pertama adalah tanah area pelabuhan. PPN Kejawan memiliki luas area pelabuhan sekitar 19,16 ha. Tanah tersebut digunakan untuk pembangunan seluruh

fasilitas pelabuhan, yaitu: gedung perkantoran pelabuhan, jalan, gedung TPI, rumah ibadah, warung makan, dan pabrik-pabrik pengolahan ikan. Fasilitas pokok kedua adalah *break water* (pemecah gelombang) yang dibangun pada 1994. *Break water* di PPN Kejawanan terdiri atas dua bagian, yaitu: bagian timur dan bagian barat. *Break water bagian timur* memiliki panjang 1.247 m, sedangkan *break water bagian barat* memiliki panjang 996 m (Dirjen PT KKP RI, 2001, p. 23).

Fasilitas pokok yang selanjutnya adalah tembok penahan tanah yang mulai dibangun pada 1996 dan terdiri atas dua bagian, yaitu tembok penahan air bagian timur dan tembok penahan air bagian barat. Tembok penahan air bagian timur memiliki lebar 950 m. Sementara itu, tembok penahan air bagian barat memiliki lebar 650 m. Pada 1998, PPN Kejawanan mengembangkan fasilitas pelabuhan yang termasuk fasilitas pokok setelah membuat sebuah alur pelayaran. Alur pelayaran yang ada di PPN Kejawanan memiliki panjang 80 m dan lebar 80 m. Dengan demikian, pada 1998 PPN Kejawanan sudah memiliki enam fasilitas pokok yang kemudian bertambah lagi setelah drainase yang memiliki panjang 3.789 m selesai dibuat. Selain itu, PPN Kejawanan juga memiliki beberapa infrastruktur pelabuhan yang meliputi jalan masuk menuju pelabuhan sepanjang 950 m, serta jalan kompleks di area pelabuhan yang dibangun pada 1997 seluas 4.671 m.

Fasilitas pelabuhan di PPN Kejawanan yang kedua adalah fasilitas fungsional. Fasilitas fungsional di PPN Kejawanan terdiri atas, gedung kantor administrasi pelabuhan, gedung TPI, jaringan air bersih, reservoir air, sumur artesis (sumur bor), gudang es, dan instalasi listrik (jaringan listrik), serta genset. Kantor administrasi yang dibangun pada 1994 berfungsi sebagai pusat kegiatan pengelolaan PPN Kejawanan. PPN Kejawanan memiliki luas kantor sekitar 300 m yang terdiri atas kantor kepala pelabuhan, kantor unit bagian tata usaha, kantor unit bagian pengelolaan, dan lain sebagainya.

Pada tahun berikutnya, yaitu 1995 dibangun fasilitas fungsional yang kedua yaitu gedung TPI dengan luas 940 m². Gedung ini difungsikan sebagai tempat untuk melakukan pelelangan ikan dari hasil tangkapan yang diperoleh oleh para nelayan di PPN Kejawanan. Bukan hanya gedung TPI, pada 1995 juga dibangun fasilitas fungsional lainnya seperti jaringan air bersih yang dilengkapi dengan pompa air dua unit, meteran, dan instalasi pipa yang jaraknya mencapai dermaga pelabuhan. Fasilitas fungsional yang keempat adalah reservoir air bersih. Reservoir yang dibangun pada 1997 memiliki kapasitas 200 m³. Reservoir tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menampung air bersih yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di area PPN Kejawanan.

Fasilitas fungsional yang kelima adalah sumur artesis (sumur bor) yang dibuat pada 2000. PPN Kejawanan memiliki air bersih yang cukup melimpah. Air bersih di PPN kejawanan bersumber pada satu unit sumur artesis yang kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di lingkungan sekitar pelabuhan. Pada 1995, di PPN Kejawanan mulai dipasang instalasi listrik (jaringan listrik) dari PLN dan *generating set* (genset) dengan kapasitas 50 KVA (Kilo Volt Amper). PPN Kejawanan memiliki dua unit jaringan listrik dengan kapasitas mencapai 11.600 VA, sedangkan untuk genset memiliki kapasitas sampai dengan 50 KVA.

Sementara itu, fasilitas penunjang yang ada di PPN Kejawanan dibangun pada 2000. Adapun fasilitas penunjang yang ada di PPN Kejawanan, antara lain: pos penjagaan/keamanan yang memiliki luas 20 m, waserda (warung serba ada) dengan luas 160 m², tempat ibadah (masjid) dengan luas 266 m², kamar mandi dengan luas 48 m², dan rumah dinas untuk kepala pelabuhan sejumlah satu unit. Perkembangan fasilitas yang ada di PPN Kejawanan merupakan bentuk dari peningkatan untuk menunjang seluruh aktivitas di PPN Kejawanan agar semakin meningkat.

Ragam Aktivitas di PPN Kejawanan pada 1994-2011

Sebagai pelabuhan yang terus mengalami perkembangan sampai akhirnya berstatus menjadi pelabuhan nusantara, PPN Kejawanan tentu memiliki aktivitas yang beragam, di samping pembangunan dan perbaikan fasilitas pelabuhan yang terus digalakan. Seluruh aktivitas yang dilakukan tidak lain adalah untuk menjamin segala kegiatan pelayaran, baik yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan dari daerah lain berjalan dengan lancar. Selain itu, berbagai aktivitas yang dilakukan di PPN Kejawanan juga dapat dipandang sebagai kontribusi PPN Kejawanan dalam rangka memberdayakan masyarakat, sehingga dapat tercapai kesejahteraan hidup yang merata di wilayah PPN Kejawanan. Di antara aktivitas yang terjadi di PPN Kejawanan, antara lain: pemasaran ikan, pendaratan ikan, produksi perikanan, armada perikanan, dan persiapan perbekalan.

Pemasaran Ikan

Hasil tangkapan yang didaratkan di TPI PPN Kejawanan disalurkan ke berbagai pasar baik lokal maupun kota. Selain itu, hasil tangkapan-tangkapan yang mendarat di PPN Kejawanan juga dipasarkan ke berbagai industri pengolahan ikan. Hasil tangkapan dari kapal *bubu* misalnya, sebagian besar dipasarkan ke Pekalongan dan Jakarta. Setelah dipasarkan di Pekalongan dan Jakarta, hasil tangkapan yang sebagian besar meliputi kakap merah dan kerapu ini kemudian di ekspor ke luar negeri. Adapun perusahaan yang menampung hasil tangkapan dari PPN Kejawanan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bernama PT. Tirta Raya Mina (Persero). Perusahaan ini menampung hasil tangkapan dari jenis kakap merah yang dinilai memenuhi standar untuk dijadikan *fillet* dan tentunya diekspor ke luar negeri. Untuk hasil tangkapan dari kapal-kapal *gill net* (*Lion Bun*), seperti cucut, pari, dan lain sebagainya diolah di industri pengolahan menjadi ikan asin. Proses selanjutnya adalah di pasarkan di Bandung, Jakarta, dan Pulau Sumatera (Dirjen PT KKP RI, 2002, ap. 28).

Hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Kejawanan sendiri merupakan ikan basah dan beku (diawetkan dengan es). Setelah didaratkan, ikan-ikan tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai tempat dan alternatif pengolahan, seperti: Pertama, diolah menjadi ikan asin oleh industri perikanan yang ada di area PPN Kejawanan, kemudian hasilnya dipasarkan di wilayah Jawa Barat. Kedua, dijual dalam bentuk ikan segar ke berbagai daerah, terutama Jakarta dan Bandung. Selain itu, ikan-ikan tersebut juga di ekspor ke Singapura, Korea, dan Hongkong melalui Bandara Soekarno-Hatta; dan ketiga, dimanfaatkan sebagai bahan baku pabrik ikan kaleng atau olahan untuk kemudian di ekspor ke Amerika Serikat (Wawancara dengan Rohendi, 30 Agustus 2017).

Pendaratan Ikan

Pendaratan ikan di PPN kejawanan berasal dari hasil tangkapan kapal yang ada di pelabuhan. Sebagian kapal yang mendaratkan ikan adalah kapal-kapal perikanan milik investor yang ada di PPN Kejawanan. Hasil tangkapannya adalah bahan baku untuk pabrik atau industri perikanan atau olahan perikanan. Pada 2001, jumlah ikan yang didaratkan melalui TPI PPN Kejawanan adalah sebanyak 2.440.955 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 4.129.785.080. Jika dibandingkan dengan hasil tangkapan pada 2000, jumlah produksi ikan yang didaratkan mengalami peningkatan sebesar 688.474 kg atau 39%. Selain itu, nilai produksi juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.247.235.130 atau 43,26%.

Jumlah pendaratan ikan di PPN Kejawanan dari 1997 sampai dengan 2001 mengalami peningkatan yang sangat pesat baik dari volume maupun nilainya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPN kejawanan selalu bertambah sehingga nilai jual ikan juga

bertambah dengan baik. Berdasar volume, jenis ikan yang paling banyak didaratkan di PPN Kejawanan adalah pari dan didominasi oleh pari burung, pari kembang, serta pari kelapa sebesar 969,973 kg. Namun demikian, nilai yang terbesar adalah ikan kakap merah, yaitu sebesar Rp. 1.726.996.160. Jenis ikan yang didaratkan di PPN Kejawanan sebagian besar adalah ikan pari dan ikan cucut. Ikan-ikan tersebut ditangkap menggunakan alat tangkap *gill net*. Pada 2008, produksi ikan pari berkisar pada angka 589,4 ton, sedangkan ikan cucut 211,5 ton dan cumi-cumi sebesar 848,1 ton. Selebihnya, hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Kejawanan adalah ikan demersal yang ditangkap menggunakan alat tangkap Bubu, seperti kakap merah, kerapu, kurisi, ikan kue dan sebagainya. Pada 2008, Bubu menghasilkan 381,6 ton (Dirjen PT KKP RI, 2008, p. 38).

Produksi Perikanan

Produksi ikan atau udang yang didaratkan di PPN Kejawanan pada 2000 sebesar 1.752.481 kg, dengan jumlah nilai Rp. 2.882.549.950. Hal ini jika dibandingkan dengan jumlah pada 1999 yang jumlahnya sebesar 1.745,309 kg dengan jumlah nilai Rp. 2.509.570.900, maka dilihat dari segi volumenya mengalami peningkatan sebesar 14,86%. Kenaikan produksi ikan pada 2000 masih sangat rendah. Hal itu terjadi karena pemindahan sementara bongkar hasil tangkapan di Pelabuhan Umum Cirebon pada Agustus sampai dengan Oktober tahun 2000. Pemindahan sementara itu terjadi karena pada waktu itu sedang dilaksanakan aktivitas pengerukan kolam/alur di area PPN Kejawanan (Dirjen PT KKP RI, 2000, p. 30).

Pada 2004, volume produksi ikan yang didaratkan di PPN Kejawanan sebesar 3.103 ton dengan nilai Rp. 9.359.372.000. Jumlah ini meningkat pada 2003, yaitu volume produksi ikan sebesar 3.070 ton dan nilainya Rp. 5.381.083.000. Dengan demikian, berdasar jumlah volume, jumlah ikan yang didaratkan mengalami kenaikan sebanyak 1,07 % dan dalam nilai produksi sebesar 73,93%. Tidak hanya dalam volume dan nilai produksi saja yang mengalami kenaikan, namun rata-rata harga ikan juga mengalami kenaikan. Pada 2003, harga ikan di pasaran berkisar Rp. 1,753 per kg, dan pada 2004 harga ikan naik menjadi Rp. 3.016 per kg. Kenaikan harga ikan tersebut disebabkan karena jenis ikan yang beragam dan mutu ikan yang didaratkan di PPN Kejawanan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2003 (Dirjen PT KKP RI, 2004, p. 20).

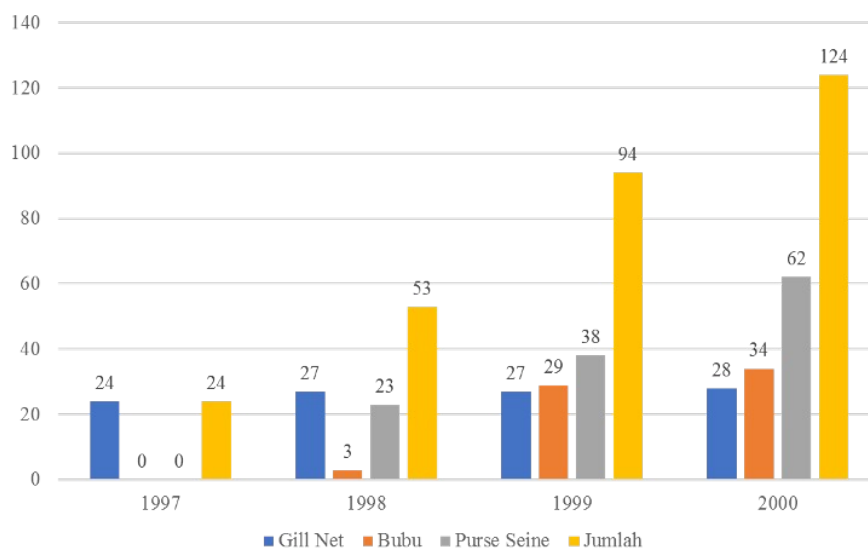
Pada 2005, volume produksi yang didaratkan di PPN Kejawanan sebesar 2.912 ton dengan nilai produksi Rp. 9.764.664.000,. Jumlah itu terbilang besar, jika dibandingkan dengan tahun 2004, yaitu sebesar 3.103 ton dengan nilai Rp. 9.359.372. Namun demikian, rata-rata harga ikan pada 2004 mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp.3.016 per kg menjadi Rp.3.353 per kg pada 2005 (Dirjen PT KKP RI, 2005, p. 25). Berdasar jenis ikan yang didaratkan di PPN Kejawanan pada 2004, ikan jenis pari merupakan jenis ikan yang paling banyak didaratkan, yaitu 654.627 kg. Jumlah ikan yang paling banyak didaratkan adalah jenis ikan kakap merah, yaitu sejumlah Rp. 1.214.907.750. Selain itu, harga jual ikan yang paling tinggi adalah ikan jenis kerapu (*Epinephelus tauvina*) (Dirjen PT KKP RI, 2004, p. 22).

Armada Perikanan

Jika dilihat dari segi aktivitas perikanan, PPN Kejawanan memiliki kondisi yang sangat berbeda dari pelabuhan-pelabuhan perikanan di daerah lain. Hal ini karena di PPN Kejawanan tidak terdapat perahu tradisional melainkan hanya ada kapal-kapal motor yang berpangkalan di area pelabuhan. Sementara perahu-perahu tradisional, semuanya berpangkalan di pelabuhan perikanan kecil yang ada di sekitar Kota Cirebon. Perkembangan kapal motor atau armada perikanan yang berpangkal (*fishing base*) di PPN Kejawanan selama empat tahun terakhir, yaitu tepatnya sejak uji

coba pengoperasian PPN Kejawanan mulai dari 1997 sampai dengan 2000 dapat dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1. Perkembangan Armada Perikanan di PPN Kejawanan Tahun 1997-2000.



Sumber: Laporan Tahunan PPN Kejawanan 2000.

Pada grafik di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun, jumlah kapal motor atau armada perikanan yang bersandar di PPN Kejawanan semakin meningkat. Pada awal pengoperasioanalannya, yaitu pada 1997, di PPN Kejawanan hanya ada kapal *gill net* (*lion bun*) yang bersandar. Akan tetapi, pada tahun berikutnya, kapal *bubu* mulai bersandar di PPN Kejawanan. Setiap tahun, jumlah kapal *bubu* yang bersandar bahkan terus meningkat. Hal ini berkaitan dengan ikan-ikan hasil tangkapan yang didaratkan. Hasil tangkapan yang di bawa oleh kapal *bubu* umumnya adalah jenis ikan ekonomis penting yang dijadikan sebagai komoditas ekspor, seperti: kerapu, kakap merah, dan lain-lain

Pada 2003, jumlah armada yang ada di PPN Kejawanan berjumlah 107 unit. Akan tetapi, pada 2004, jumlah armada tersebut mengalami penurunan menjadi 105 unit, yang terdiri atas *gill net* 65 unit, *bubu* 39, dan jenis lainnya satu unit. Oleh sebab itu, jika dirata-rata, maka armada perikanan di PPN Kejawanan mengalami penurunan sebesar 1,86%. Sementara itu, jumlah armada perikanan pada 2008 adalah sebesar 62 unit, terdiri atas *gill net* 20 unit, *bubu* 23 unit, dan *bouke ami* 19 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah armada perikanan pada 2007, maka pada 2008 jumlah armada kapal mengalami penurunan sampai dengan 11,43%. Hal itu kemudian berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan kapal pada 2008 yang juga menurun. Kapal yang masuk tercatat 334 kali, sedangkan jumlah kapal keluar tercatat 355. Sementara itu, untuk kapal bongkar ikan tercatat sejumlah 330 kali (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 28).

Kapal-kapal yang masuk ke PPN Kejawanan merupakan kapal yang melakukan aktivitas bongkar hasil tangkapan, pengisian perbekalan, kegiatan perbaikan kapal (*floating repair*), dan aktivitas lainnya, seperti menunggu untuk melaut. Berbeda dari kapal *bubu* yang bersandar di PPN Kejawanan untuk membongkar hasil tangkapan, kapal *pure seine* yang ada di PPN Kejawanan tidak melakukan aktivitas demikian, tetapi hanya mengisi perbekalan (solar, air, dan es) saja. Selain itu, kapal *pure seine* juga bersandar di PPN Kejawanan untuk berlindung pada musim barat. Hal itu karena aktivitas pendaratan hasil tangkapan dilakukan di Indramayu. Dengan demikian, apal-kapal yang beroperasi di PPN Kejawanan antara

lain kapal *gill net*, kapal *bubu*, kapal jaring cumi (*bouke ami*), dan kapal *purse seine* dengan ukuran rata-rata 20-50 GT.

Sebelum bersandar di PPN Kejawanan, seluruh kapal yang masuk ke wilayah PPN Kejawanan telah melapor kepada petugas Pengawas Perikanan di Pos terpadu. Kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Pengawas Perikanan terhadap kapal yang masuk antara lain menerima penyerahan *log book* perikanan dari nakhoda, mengumpulkan data primer, serta memberikan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan (STBLK) kapal. Sementara itu, semua dokumen kapal diserahkan kepada petugas syahbandar. Tugas lain dari Petugas Pengawas Perikanan adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen surat perizinan untuk kemudian memberikan surat izin Layak Tangkap Operasional (LTO) kepada kapal-kapal yang akan keluar dari pelabuhan (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 28).

Kapal-kapal yang berkunjung di PPN Kejawanan adalah kapal dengan jenis yang berbeda-beda, begitu pula dengan kebutuhannya yang juga berbeda. *Pertama*, kapal-kapal yang memang berpangkalan atau berdomisili di PPN Kejawanan Cirebon; *kedua*, kapal-kapal yang berkunjung hanya untuk mengisi perbekalan (es, solar, dan air); *ketiga*, kapal-kapal yang hanya ingin berlindung pada waktu ada gelombang besar, tetapi tidak sampai mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Kejawanan. PPN Kejawanan memiliki tiga macam armada penangkapan, yaitu: *gill net*, *bubu*, dan *bouke ami* dengan lama waktu perjalanan berkisar antara 15 sampai dengan 90 hari. Seluruh armada, baik yang berdomisili di PPN Kejawanan, maupun yang tidak, semuanya melakukan aktivitas tambat labuh di dermaga tersebut. Total armada yang masuk, setiap bulan adalah sekitar 3-14 kapal, kemudian armada yang keluar sekitar 1-22 kapal setiap bulan. Pada 2007, tercatat jumlah kapal yang berpangkalan di PPN Kejawanan adalah 70 unit, terdiri atas 23 unit kapal *gill net*, 27 unit kapal *bubu*, dan 20 unit kapal cumi. Jumlah armada kapal yang bongkar dan mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Kejawanan Cirebon adalah sebanyak 334 kapal, terdiri atas kapal *bubu* 147 buah, kapal *gill net* 74 buah, dan *bouke ami* 113 buah (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 30).

Tabel 1. Kegiatan Kapal Masuk, Keluar, dan Bongkar di PPN Kejawanan 2005-2009.

Tahun	Jaring Insang (Gill net)			Bubu			Jaring Cumi (Boeke Ami)		
	Masuk	Keluar	Bongkar	Masuk	Keluar	Bongkar	Masuk	Keluar	Bongkar
2005	163	138	129	294	304	285	28	86	88
2006	91	115	80	210	203	201	103	86	88
2007	74	67	74	163	143	147	109	131	113
2008	69	97	69	134	136	117	131	126	144
2009	103	122	76	88	71	72	144	181	129
Kecenderungan Perkembangan	-14,2	-5,4	-11,7	-48,8	-53,5	-45,6	+26	+32,5	+25,6

Sumber: Profil PPN Kejawanan 2010.

Keterangan:

Tanda (-) menurun menurun setiap tahun,
tanda (+) yaitu meningkat tiap tahun.

Pada Tabel 1 terlihat kegiatan tambat labuh (bongkar) di PPN Kejawanan pada 2005 sampai dengan 2009 benar-benar mengalami fluktuasi. Hal ini karena nelayan yang menggunakan alat tangkap *gill net* jumlahnya semakin turun, baik dari kegiatan kapal masuk, keluar, maupun bongkar hasil tangkapannya. Selain itu, armada penangkapan yang menggunakan alat tangkap *bubu* juga mengalami penurunan kegiatan tambat labuh, mulai dari kegiatan masuk, keluar, sampai

dengan bongkar muatan. Hal itu karena banyak nelayan *bubu* yang beralih menjadi nelayan *bouke ami*. Dengan demikian, secara otomatis jumlah nelayan *bouke ami* yang bersandar di PPN Kejawanen meningkat.

Penyaluran Perbekalan

Pelayanan perbekalan bagi kapal-kapal perikanan di PPN Kejawanen merupakan penerapan dari salah satu fungsi pelabuhan perikanan, yaitu sebagai tempat untuk memperlancar kegiatan kapal-kapal perikanan. Pelayanan perbekalan di PPN Kejawanen menyediakan pelayanan berupa: pelayanan air bersih, solar, dan es. Es, bbm, dan air bersih adalah kebutuhan logistik kapal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan melaut. Adapun penjelasan dari penyaluran es, bbm, dan air bersih yang ada di PPN Kejawanen adalah sebagai berikut.

Pertama, penyaluran es yang merupakan kebutuhan vital bagi kegiatan penangkapan ikan, khususnya untuk kapal-kapal yang tidak memiliki sistem pendingin. Oleh sebab itu, es mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hal menentukan kualitas mutu hasil tangkapan sebelum didaratkan atau dibongkar di pelabuhan. Sampai saat ini, kebutuhan es untuk memenuhi kebutuhan kapal penangkap ikan di PPN Kejawanen masih disuplai oleh beberapa pabrik es yang ada di luar area pelabuhan. Akan tetapi, jaraknya tidak terlalu jauh dengan PPN Kejawanen, sehingga masih dapat diakses dengan mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Sistem pengelolaan pabrik es di sekitar PPN Kejawanen sendiri dikuasai oleh swasta (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 31).



Gambar 1. Kegiatan Penyaluran Es di Atas Kapal.
Sumber: Laporan Tahunan PPN Kejawanen 2007.

Kedua, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan salah satu jenis perbekalan yang sangat penting bagi kapal-kapal penangkap ikan, tidak terkecuali untuk kapal-kapal yang singgah di PPN Kejawanen. PPN Kejawanen sendiri memiliki sebuah SPBU Dwi Fungsi yang dikelola oleh PT Evadarta Ciremai. Untuk kapal-kapal bertonase <30 GT, SPBU di PPN Kejawanen telah menyediakan bahan bakar berupa solar yang telah disubsidi oleh pemerintah. Sementara itu, untuk kapal-kapal bertonase >30 GT disediakan solar nonsubsidi.

Ketiga, penyaluran air bersih yang penting dan tidak dapat dilepaskan dalam melakukan aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan. Pemenuhan air bersih untuk kebutuhan pokok di PPN Kejawanen tidak hanya untuk kebutuhan kapal saja, tetapi untuk kebutuhan industri pengolahan ikan, dan untuk kebutuhan warung-warung yang ada di wilayah PPN Kejawanen. Pemenuhan air bersih yang disalurkan untuk

kebutuhan kapal sepenuhnya disediakan oleh pihak pelabuhan, sedangkan untuk industri pengolahan, dan warung-warung makan sebagian disediakan oleh pelabuhan dan sebagian lagi berasal dari sumur artesis (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 32).



Gambar 2. Penyaluran Kebutuhan Air Bersih ke Kapal.
Sumber: Bayyinah 2006.

Kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terhadap Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Kota Cirebon

PPN Kejawanan berperan sebagai fasilitator yang bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat nelayan, yaitu meningkatkan taraf hidup dan menyejahterahkan nelayan (masyarakat pesisir) yang ada di wilayah Kota Cirebon. Pemberdayaan tersebut dapat dilihat dari segi sosial yang mencakup pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga nelayan dan pembinaan nelayan. Dalam bidang ekonomi, tujuan dari pemberdayaan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kerja dan kesejahteraan hidup nelayan.

Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Nelayan

Istri nelayan memiliki posisi dan peranan yang signifikan dalam menopang kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Walaupun pandangan umum menganggap bahwa istri jika bekerja hanya sekadar “membantu atau melengkapi” pendapatan suami, namun dalam praktiknya peranan istri dalam bekerja “relatif setara” dalam mengemban tanggung jawab ekonomi dan kelangsungan hidup rumah tangga (Kusnadi, 2006, p. 56). Para istri nelayan di Kelurahan Samadikun sejak 1980, sudah terlibat dalam mencari nafkah di sektor perikanan. Mereka umumnya menjadi buruh di pengolahan ikan asin di dekat rumahnya dan menjual ikan hasil tangkapan suami (Wawancara dengan Darina, 4 mei 2017).

Bekerja di sektor publik bagi kaum perempuan merupakan bentuk dari tanggung jawab terhadap rumah tangga. Baik suami maupun istri tidak merasa dieksploitasi dan istri tidak merasa martabat dan harga dirinya tergadaikan (Kusnadi, 2008, p. 75). Para istri nelayan umumnya membantu suaminya mencari nafkah dengan berdagang ikan, bekerja di pabrik pengeringan ikan asin, dan membuka warung atau toko, menjadi pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Keadaan demikian menunjukkan bahwa perempuan nelayan memandang bahwa bekerja adalah bagian dari kewajiban, selain kewajiban sebagai istri dan seorang ibu. Mereka berpandangan bahwa membantu suami mencari nafkah adalah tanggung jawab seorang istri. Dengan demikian, baik istri maupun suami memiliki tanggung jawab yang sama dalam kehidupan ekonomi (Kusnadi, 2008, p. 74). Sebagai contoh,

istri dari Arifin seorang nelayan di Kelurahan Samadikun yang membantu mencari nafkah dengan cara berdagang ikan di pasar sejak 1990. Ikan yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan suaminya melaut (Wawancara dengan Darina, 4 mei 2017).

Adapun tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk menyejahterahkan kehidupan dan ikut membantu meningkatkan pendapatan suami. Kegiatan pemberdayaan secara intensif dilakukan sejak 2008. Salah satu kegiatannya adalah pengolahan makanan dari bahan baku ikan, seperti pembuatan abon ikan, baso ikan, dan makanan ringan lainnya. Kegiatan rutin dilakukan selama dua sampai tiga kali dalam setahun (Wawancara dengan Ismail, 25 April 2017) dan didampingi oleh staf DKP3 Kota Cirebon. Dalam kegiatan ini, PPN Kejawanan berperan memfasilitasi para perempuan agar dapat bekerja di industri pengolahan ikan yang ada di sekitar wilayah PPN Kejawanan.

Upah yang diterima mereka selama bekerja di industri perikanan tidaklah besar, namun cukup membantu perekonomian keluarga. Sebagai contoh, di Kelurahan Samadikun industri pengolahan ikan asin tradisional sudah ada sejak 1980-an. Pada 1990, industri ini berkembang pesat, yaitu menjadi sebanyak tujuh buah. Adapun tenaga kerja yang diserap sekitar 100 orang adalah ibu rumah tangga, remaja, dan lansia. Namun demikian, pada 2000 jumlah industri pengolahan ikan di Kelurahan Samadikun ternyata berkurang, yaitu menjadi tiga buah.

Pada 2000, jumlah pengrajin ikan asin di Kelurahan Samadikun berjumlah tiga buah, yaitu milik Kadmini, Rusmini, dan Jaya (Wawancara dengan Samin, 22 Juli 2018). Selain di Kelurahan Samadikun, terdapat juga industri pengolahan ikan asin di kampung Pesisir. Pada 1995, di Kampung Pesisir terdapat lima buah pabrik pengolahan ikan asin. Pabrik pengolahan ikan asin yang cukup besar adalah pabrik milik Jumina. Pabrik ini memiliki pekerja sebanyak 15-20 orang. Adapun untuk pabrik yang kecil, pegawai yang dimiliki berjumlah 3-4 orang. Sistem upah yang digunakan adalah model harian, yaitu setiap pengerjaan membelah ikan, menjemur, dan membungkus ikan per satu kg diberi upah Rp. 700-Rp.1.000 (Wawancara dengan Arifin, 22 Juli 2018).

Para istri nelayan umumnya bekerja di berbagai industri pengolahan ikan, baik tradisional maupun modern, seperti pengasinan ikan, pengalengan rajungan, penyortiran udang, dan lain-lain. Upah yang diperoleh buruh di industri pengasinan ikan bergantung pada seberapa banyak ikan yang mereka belah dan jemur. Sebagai deskripsi untuk pengerjaan membelah ikan, menjemur, dan membungkus ikan per satu kilogram ikan, buruh perempuan diberi upah sekitar Rp.1.500-Rp.2.000. Rata-rata upah yang diterima pekerja perempuan sekitar Rp. 15.000-Rp. 20.000 per hari. Meskipun upah yang diterima tergolong kecil, namun penghasilan tersebut sudah cukup membantu memenuhi kebutuhan makan dan jajan anak-anaknya (Wawancara dengan Darina, 4 mei 2017).

Salah satu pabrik pengolahan ikan asin terdapat di Kelurahan Samadikun adalah milik Rumini. Pabrik ini merupakan pabrik keluarga yang didirikan oleh Ibunya, yaitu Rasti pada 1980. Dalam perkembangannya, pabrik ini mengalami kemunduran dan beralih manajemen dari yang semula dikelola oleh Rasti, kemudian pada 2000 dikelola oleh anaknya, yang tidak lain adalah Rumini. Dalam proses pengeringan ikan asin, pabrik ini masih menggunakan tenaga panas matahari. Proses pengasinan ikan meliputi beberapa tahapan, *pertama*, diawali dengan membersihkan ikan yang sebelumnya telah disortir; *kedua*, memotong ikan dengan ukuran kecil atau hanya dibelah saja; *ketiga*, ikan direndam dalam larutan air garam dan perendaman memakan waktu antara 12 jam sampai dengan 24 jam atau semalaman; *keempat*, adalah proses penjemuran ikan sampai kering; *kelima*, proses pembungkusan yang kemudian dijual kepada para pengepul di Cirebon, Jakarta, Bandung, dan daerah lainnya (Wawancara dengan Rumini, 28 Januari 2018).

Pada 2000, rata-rata setiap pabrik pengolahan ikan mempunyai buruh perempuan sebanyak 10-13 orang. Jumlah buruh tersebut dapat bertambah hingga mencapai 15-20 orang apabila jumlah pasokan ikan yang akan diolah menjadi ikan asin banyak (Wawancara dengan Rumini, 28 Januari 2018). Pada 2007, jumlah buruh di pabrik ikan asin semakin sedikit, yaitu berkisar antara lima sampai dengan tujuh orang. Hal itu karena pasokan ikan dari pengepul semakin mahal, sehingga para pemilik pabrik tidak berani membeli ikan dalam jumlah besar.

Sementara itu, buruh pengolahan ikan didominasi oleh ibu rumah tangga di sekitar pabrik. Sistem upah yang berlaku adalah sistem harian dan upah yang diterima oleh para buruh bergantung pada jumlah ikan asin yang dibelah, dijemur, dan dibungkus. Pada akhirnya, pemberdayaan yang dilakukan oleh PPN Kejawanan melalui sosialisasi, berdampak signifikan terhadap peningkatan upah yang diterima oleh buruh perempuan. Mereka mendapatkan tambahan upah dari kegiatan pengolahan ikan menjadi abon, *nugget*, dan baso ikan.

Pembinaan Nelayan

Hubungan antara PPN Kejawanan dengan masyarakat nelayan Kota Cirebon bersifat kemitraan. Hubungan ini terwujud dari adanya pembinaan yang dilakukan oleh PPN Kejawanan terhadap masyarakat nelayan Kota Cirebon. Pembinaan yang dilakukan banyak bentuknya, seperti sosialisasi perizinan melaut, alat tangkap yang dipakai untuk melaut, manajemen KUB, dan lain sebagainya. Kegiatan pembinaan dan sosialisasi rutin diadakan setiap tahun di gedung nelayan PPN Kejawanan (Wawancara dengan Anam Tofani, 10 Februari 2017).

Pada 2003, PPN Kejawanan mengadakan kegiatan sosialisasi dan membentuk KUB di tiga titik wilayah perkampungan nelayan, yaitu: Kelurahan Cangkol, Kampung Pesisir (Panjunan), dan Kelurahan Samadikun. Kegiatan tersebut atas kerjasama dari PPN Kejawanan dengan KUD Mina Bahari, DPC HNSI Kota Cirebon, dan DKP3 Kota Cirebon yang dilaksanakan pada 18 September 2003. Pada 2004, PPN Kejawanan membentuk forum komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang diberi nama "Mina Sadar Kejawanan". Forum komunikasi ini terdiri atas 14 kelompok nelayan yang berasal dari Kelurahan Panjunan (kampung pesisir) dan Kelurahan Samadikun Kota Cirebon. Untuk memperkuat kedudukan forum komunikasi ini, maka dilakukan proses pendaftaran Akte Notaris. Dari setiap KUB dipilih satu orang untuk mejadi kepala rukun nelayan di setiap perwakilan wilayah. Kegiatan tersebut terselenggara pada 18-19 Juni 2004 di PPN Kejawanan.

Forum KUB dibentuk dengan tujuan meningkatkan pembinaan perikanan tangkap skala kecil. Dari kegiatan sosialisasi dan penumbuhan KUB ini, nelayan mendapatkan informasi peluang pembiayaan pengembangan unit bisnis perikanan terpadu (Dirjen PT KKP RI, 2005, p. 30). Pemberdayaan terhadap nelayan dilakukan oleh PPN Kejawanan dan bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kota Cirebon, dalam bentuk penyuluhan penangkapan ikan, pengolahan ikan, usaha perikanan tangkap dan budi daya, serta tentang pertambakan. Melalui aktivitas ini, diharapkan kemampuan nelayan dalam kegiatan perikanan menjadi lebih baik. PPN Kejawanan berperan sebagai mediator antara masyarakat nelayan dengan pemerintah yang bertujuan untuk mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di pesisir Kota Cirebon. Selain itu, nelayan juga berkewajiban melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan atau ada dugaan tindak pidana di bidang perikanan kepada petugas Pengawasan Perikanan, kepala pelabuhan, Kepala Dinas Perikanan atau aparat penegak hukum seperti TNI AL, dan lain-lain. (Dirjen PT KKP RI, 2004, p. 32).

Pada 2004, PPN Kejawanan membentuk dan meresmikan KUB di setiap pesisir Kota Cirebon dan dilanjutkan dengan melakukan pelatihan manajemen KUB

untuk dapat memaksimalkan masyarakat nelayan lebih optimal dalam melaksanakan program-program KUB. Kegiatan pembinaan manajemen KUB rutin dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada September 2006, 10-11 Mei 2007, dan 29-30 April 2008. Upaya lain yang dilakukan oleh PPN Kejawanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan adalah melalui kegiatan usaha kemitraan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan jaminan pemasaran produksi nelayan dengan harga produksi yang lebih menguntungkan, meningkatkan pangsa produksi, dan meningkatkan kepemilikan aset nelayan mitra yang berskala usaha kecil. Bagi perusahaan mitra, melalui kegiatan tersebut pasokan bahan baku ikan untuk produksi akan terjamin, sehingga yang bersangkutan dapat mengembangkan kualitas produknya. Dalam proses kemitraan ini, PPN Kejawanan menjadi penghubung antara nelayan dengan perusahaan mitra melalui kegiatan temu kemitraan. Melalui temu kemitraan ini, masing-masing pihak dapat menyampaikan visi, persepsi, dan kemampuan yang mereka miliki, serta dapat membuka peluang kemitraan yang akan dilakukan bersama (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 41).

Penyerapan Tenaga Kerja

Salah satu upaya dalam hal pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh PPN Kejawanan adalah dengan mengikutsertakan peran swasta dalam pengembangan dan menunjang fungsi PPN kejawanan. PPN Kejawanan memberikan pelayanan jasa berupa penyewaan lahan kepada para investor untuk membuka industri perikanan. Industri perikanan di area pelabuhan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.

Penyerapan tenaga kerja pada 2009 adalah 1.845 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang berjumlah 1.768 orang (Dirjen PT KKP RI, 2009, p. 39). Penyerapan tenaga kerja di PPN Kejawanan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan saja, tetapi berasal dari para pekerja yang bekerja di perusahaan di area pelabuhan perikanan. Pabrik yang ada di PPN Kejawanan tidak hanya bergerak di industri perikanan saja, tetapi mereka juga bergerak di bidang lainnya, seperti *cold storage*, bengkel, *docking*, SPBU, dan warung makan sebanyak empat unit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PPN Kejawanan merupakan lahan pekerjaan bagi banyak orang (Dirjen PT KKP RI, 2009, p. 40).

Dari 1998 sampai dengan 2009, di area PPN Kejawanan banyak terdapat industri pengolahan ikan dan sejenisnya, seperti rajungan dan udang. Para pemilik pabrik sebagian besar adalah pemilik kapal, hanya sebagian saja yang tidak memiliki kapal. Pemasaran hasil pengolahan ikan yang ada di area PPN Kejawanan tidak hanya di pasarkan di dalam negeri, tetapi juga sampai di ekspor ke luar negeri. Sebagai contoh, pabrik pengolahan ikan milik PD. Sambu. Pabrik pengolahan ikan tersebut telah menghasilkan olahan ikan yang berhasil menembus pasar luar negeri. Adapun olahan ikan yang dihasilkan adalah teri nasi dan bawal putih. Olahan ikan tersebut diekspor ke Korea, Jepang, dan Hongkong. Sementara itu, untuk rajungan dilakukan oleh PT. Tonga Tiur Putra yang juga melakukan kegiatan ekspor rajungan kaleng ke Amerika (Dirjen PT KKP RI, 2001, p. 31).

Keberadaan industri-industri perikanan di area PPN Kejawanan ini tentu semakin memperluas lapangan pekerjaan yang kemudian terbuka untuk masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya. Industri-industri perikanan tersebut menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Hal itu karena kesempatan kerja bukan hanya dibuka untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk perempuan. Para perempuan umumnya bekerja di bidang penyortiran ikan. Hampir 80% buruh pabrik berasal dari wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya, dan sisanya, yaitu sebanyak 20% berasal

dari luar wilayah Cirebon, seperti Tegal, Brebes, dan lain-lain (Wawancara dengan Kusniadi, 30 Agustus 2017).

Pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh PPN Kejawanan masih belum optimal, sehingga diperlukan program-program pemberdayaan lain yang dapat membuat masyarakat nelayan menjadi lebih sejahtera. Selain itu, pemberdayaan juga harus bersifat jangka panjang dan PPN Kejawanan harus dapat merangkul semua pihak serta bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat nelayan itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan program-program yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat nelayan Kota Cirebon.

Pembangunan ekonomi di sektor perikanan lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan. Namun pada kenyataannya, kehidupan nelayan masih belum sejahtera. Pendapatan mereka masih berada di bawah rata-rata, sehingga mereka belum terlepas dari kemiskinan. Banyak upaya yang dilakukan oleh PPN Kejawanan untuk ikut membantu meningkatkan kualitas hidup nelayan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh PPN Kejawanan adalah melalui pemberdayaan masyarakat nelayan. Meski demikian, pemberdayaan tersebut bukan hanya tanggung jawab pelabuhan perikanan saja, tetapi juga tanggung jawab dinas terkait, dan masyarakat nelayan itu sendiri. Mereka mempunyai peranan yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga hasil dari pemberdayaan tersebut diharapkan dapat membuat kehidupan nelayan menjadi lebih baik.

Simpulan

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan adalah pelabuhan perikanan yang masih dalam tahap pengembangan. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan status. Pada awalnya, pengoperasian pelabuhan berada dalam status uji coba. Sampai akhirnya, statusnya berubah menjadi PPN. Peningkatan status tersebut dilatarbelakangi oleh pembangunan fisik dan aktivitas pelayanan jasa di pelabuhan yang semakin membaik.

Perkembangan PPN Kejawanan mulai dari 1994 sampai dengan 2011 disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, aspek geografis. Aspek geografis menyangkut letak PPN Kejawanan yang berada di bagian timur Jawa Barat, sehingga sangat strategis atau dapat dikatakan sebagai pintu gerbang bagian Timur Jawa Barat. Keadaan tersebut memudahkan pemasaran hasil pengolahan perikanan ke daerah Bandung dan Jakarta. *Kedua*, perkembangan pembangunan sarana dan prasarana berupa fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Akan tetapi, pihak pelabuhan masih belum maksimal dalam hal pengelolaan lahan kosong. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan kegiatan di pelabuhan dapat berjalan dengan lancar dan baik. *Ketiga*, aktivitas kepelabuhanan mulai dari 1994 sampai dengan 2011 menunjukkan peningkatan, walaupun tidak terlalu besar. Peningkatan itu berupa jumlah produksi ikan dan nilai produksi, pemasaran produksi ikan, jumlah volume pendaratan ikan, frekuensi kunjungan kapal yang mendaratkan ikan, penyerapan tenaga kerja, jumlah perbekalan kapal (solar, Es, dan air), dan aktivitas pelayanan jasa di pelabuhan yang terus meningkat.

PPN Kejawanan berperan dalam pemberdayaan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan yang direalisasikan dengan berbagai kegiatan. *Pertama*, dilihat dari segi sosial, peranan PPN Kejawanan sangat produktif melakukan pemberdayaan bagi para perempuan yang sebagian besar adalah istri-istri nelayan. Pemberdayaan tersebut dilakukan atas kerja sama antara PPN Kejawanan dengan Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon. Implementasi dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan antara lain

adalah dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang perikanan terhadap para nelayan, dan melakukan pembinaan nelayan Kota Cirebon. Kegiatan yang dilakukan oleh PPN Kejawanan memberikan perbaikan kehidupan kepada para nelayan, meskipun masih belum optimal. *Kedua*, keberadaan PPN Kejawanan memberikan dampak ekonomi yang baik, berupa peluang kerja di area PPN Kejawanan yang semakin terbuka untuk masyarakat umum, seperti: nelayan/ABK, pengurus kapal, buruh di industri pengolahan ikan, usaha perbaikan kapal, usaha warung makan, perbekalan kapal, serta mendorong industri berkaitan dengan sektor perikanan. Pemberdayaan PPN Kejawanan, jika dipandang dari ekonomi, juga memiliki pengaruh yang besar. Hal itu terlihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak. Kehadiran PPN Kejawanan memberi pengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat, terlihat dari kesempatan kerja di pabrik-pabrik pengolahan perikanan, pabrik es, usaha warung makan, jasa perbaikan kapal, usaha perbekalan kapal dan lain-lain yang semakin terbuka. Kesempatan tersebut terbuka karena peluang usaha yang semakin luas, sebagai dampak dari perkembangan produksi perikanan yang ada di sekitar wilayah PPN Kejawanan Cirebon.

Namun demikian, perkembangan di PPN Kejawanan belum dapat dirasakan secara langsung oleh nelayan kecil yang ada di Kelurahan Samadikun, Kampung Pesisir, dan Kelurahan Cangkol. Hal itu terutama karena mereka masih belum dapat ikut serta dalam kegiatan pelelangan di TPI Kejawanan. Selain itu, mereka juga tidak dapat melakukan aktivitas lelang di TPI Samadikun, TPI Kampung Pesisir, dan TPI Cangkol karena TPI sudah tidak berfungsi lagi, sehingga mereka menjual ikan hasil tangkapan ke tengkulak atau di jual oleh istri ke pasar.

Pernyataan

Artikel ini merupakan ringkasan dari Tesis penulis yang berjudul “Perkembangan Pelabuhan Perikanan Kejawanan dan Kontribusinya terhadap Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Kota Cirebon Tahun 1994-2011”.

Referensi

- Al Bayyinah, A. (2002). *Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Cirebon dan strategi pengembangannya*. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Bappeda Kota Cirebon Tahun 2003.
- BPS (2002). *Cirebon dalam angka tahun 2002*. (2002). Cirebon: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.
- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2001). *Buku profil PPN Kejawanan tahun 2000*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2002). *Laporan tahunan PPN Kejawanan Cirebon tahun 2002*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2005). *Laporan tahunan PPN Kejawanan tahun 2004*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2005). *Laporan tahunan PPN Kejawanan tahun 2004*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2006). *Laporan tahunan PPN Kejawanan tahun 2005*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2006). *Laporan tahunan PPN Kejawanan tahun 2005*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2008). *Laporan tahunan PPN Kejawanan tahun 2007*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2008). *Laporan tahunan PPN Kejawanan tahun 2007*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.

- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2008). *Laporan tahunan PPN Kejawanan tahun 2008*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2008). *Laporan tahunan PPN Kejawanan Tahun 2008*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2009). *Laporan tahunan PPN Kejawanan tahun 2009*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
- Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2010). *Laporan tahunan PPN Kejawanan tahun 2010*. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
- Gottschalk, Louis. (1983). *Mengerti sejarah* (Nugroho Notosusanto, terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kusnadi, dkk. (2006). *Perempuan pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Kusnadi. (2008). *Akar kemiskinan nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, Abdul. (2009). *Bertahan di tengah krisis: Komunitas Tionghoa dan ekonomi Kota Cirebon*. Yogyakarta: Ombak.

Daftar Informan

Rakiman
Rohendi
Darima
Ismail
Samin
Rumini
Kusniadi